

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini membahas kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru terhadap etnis Tionghoa, khususnya di wilayah Cirebon, sepanjang periode 1967 hingga 1998. Berdasarkan hasil penelusuran dokumen, kajian pustaka, dan penelusuran sejarah lokal, dapat ditarik sejumlah kesimpulan yang menggambarkan bagaimana kekuasaan negara membentuk dan membatasi identitas kultural kelompok etnis minoritas ini. Sejak awal kelahirannya, Orde Baru memosisikan stabilitas nasional sebagai agenda utama. Dalam konteks pasca-G30S, pemerintah membangun narasi besar mengenai bahaya komunisme, dan dalam narasi itu, etnis Tionghoa kerap dijadikan sebagai pihak yang dicurigai karena adanya keterkaitan historis dan simbolik dengan negara Republik Rakyat Tiongkok. Kecurigaan tersebut melahirkan kebijakan represif, salah satunya adalah Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967, yang secara tegas membatasi ruang gerak budaya Tionghoa di ranah publik.
2. Kebijakan ini tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga menjalar sampai ke tingkat lokal. Di Cirebon, aparat pemerintah daerah turut serta dalam melaksanakan larangan-larangan tersebut. Berbagai bentuk budaya yang selama ini menjadi bagian dari ekspresi identitas etnis Tionghoa, seperti

perayaan Imlek, Cap Go Meh, serta penggunaan simbol-simbol budaya seperti lampion, aksara Hanzi, dan barongsai, secara perlahan dipaksa



untuk menghilang dari ruang publik. Tidak sedikit warga Tionghoa yang merasa takut dan tertekan, hingga memilih untuk menyesuaikan diri dengan budaya mayoritas agar dapat bertahan secara sosial maupun ekonomi. Tekanan bukan hanya datang dari aspek budaya, tetapi juga administrasi. Banyak warga Tionghoa yang mengganti nama mereka menjadi nama-nama Indonesia sebagai bentuk adaptasi terhadap kebijakan diskriminatif, meskipun perubahan ini seringkali dilatari oleh tekanan birokrasi dalam mengurus dokumen resmi. Sekolah-sekolah berbahasa Mandarin ditutup, surat kabar Tionghoa diberangus, dan bahasa leluhur perlahan menghilang dari generasi muda. Dalam konteks ini, diskriminasi bukan hanya menghapus identitas simbolik, tetapi juga memutus mata rantai transmisi budaya lintas generasi. Di balik kebijakan yang diklaim sebagai bentuk asimilasi demi persatuan nasional, terselip logika kekuasaan yang menolak keberagaman. Pemerintah Orde Baru, dengan dalih membangun bangsa yang homogen dan kuat, menekan perbedaan etnis dengan pendekatan yang memaksa dan represif. Dalam hal ini, komunitas Tionghoa di Cirebon hanyalah satu dari sekian banyak kelompok etnis yang harus berhadapan dengan politik identitas negara yang eksklusif dan membatasi.

Namun di tengah segala bentuk represi tersebut, masyarakat Tionghoa menunjukkan daya tahan budaya dan strategi adaptasi yang luar biasa. Meskipun dalam kondisi tekanan, nilai-nilai kultural tetap dijaga, meski secara diam-diam dan terbatas di

ruang privat. Ini membuktikan bahwa identitas budaya tidak mudah dilenyapkan hanya karena tekanan negara.

B. Saran

Melihat kenyataan sejarah yang telah terurai dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat disarankan untuk masa kini dan masa mendatang:

Pertama, negara perlu membuka ruang refleksi dan rekonsiliasi sejarah. Diskriminasi yang pernah terjadi terhadap etnis Tionghoa bukan hanya menjadi bagian dari sejarah kelompok tersebut, melainkan juga sejarah bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pengakuan terhadap masa lalu yang kelam ini menjadi langkah penting dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif.

Kedua, budaya dan sejarah etnis Tionghoa perlu diangkat kembali ke ruang publik, bukan sekadar sebagai ornamen kebudayaan, tetapi sebagai pengakuan atas kontribusi nyata mereka dalam sejarah sosial, ekonomi, dan budaya bangsa Indonesia. Pemerintah daerah, seperti di Cirebon, dapat mengambil peran strategis dalam hal ini, dengan memfasilitasi kegiatan budaya, festival, dan pendidikan sejarah multikultural di sekolah-sekolah.

Ketiga, masyarakat luas juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap saling menghormati dalam keberagaman, serta memahami bahwa perbedaan budaya bukanlah ancaman, melainkan kekayaan bangsa. Pemahaman seperti ini perlu dibangun sejak dini melalui pendidikan dan media.

Terakhir, bagi peneliti-peneliti berikutnya, disarankan untuk memperluas kajian mengenai pengalaman komunitas minoritas di Indonesia, termasuk strategi perlawanan simbolik, rekonstruksi identitas pasca-Orde Baru, serta dinamika multikulturalisme di wilayah-wilayah lain. Pendekatan yang lebih interdisipliner, dengan menggabungkan sejarah, sosiologi, dan kajian budaya, akan semakin memperkaya pemahaman kita terhadap relasi antara negara dan etnis minoritas.

